BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil Peneltian

Peneltian ini dilaksanakan pada Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur, data yang digunakan dalam peneletian ini adalah data primer dan sekunder yang berkaitan dengan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur, data tersebut diambil menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara, dalam metode wawancara orang yang diwawancarai adalah Bapak Valentinus Medardus selaku Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Data yang diambil adalah data target dan realisasi, Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah Serta PAD selama lima tahun terhitung dari tahun 2017-2021.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif Kuantitaif yaitu menjelaskan hasil dari uji yang menggunakan uji SPSS 21. Untuk mendapatakan hasil dari uji, penelitian ini menggunakan metode analisis statistic inferensial, yang artinya uji tersebut memuat beberapa uji, sehingga dari uji tersebut dapat membuktikan bahwa Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Pajak Daerah, serta Retribusi Daerah berpengaruh atau tidak terhadap PAD.

Dalam penelitian ini data yang diminta menggunakan metode dokumentasi, sehingga data yang diberikan berupa data asli yang tidak direkayasa, data tersebut nantinya akan diolah dan akan di uji, untuk mengetahui apakah Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Pajak Daerah, Retribbusi Daerah memengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Berikut adalah data Target dan Realisasi dari ke 5 variabel independent terhadap variabel depenedent Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 5.1 Target dan Realisasi ke 5 variabel

Target dan Realisasi ke 5 variabel				
Variabel	Tahun	Realisasi		
Jumlah Penduduk	2017	262,606 (jiwa)		
	2018	267,310 (jiwa)		
	2019	269,686 (jiwa)		
	2020	271,290 (jiwa)		
	2021	276,308 (jiwa)		
Pengeluaran pemerintah	2017	Rp.741.571.733.791.01		
	2018	Rp.808.531.761.951.03		
	2019	Rp.852.907.132.856.01		
	2020	Rp.776.176.657.458.18		
	2021	Rp.861.511.815.580.00		
Produk Domestik	2017	Rp.31.441.436.000		
Regional Bruto	2018	Rp.34.554.445.000		
	2019	Rp.37.681.790,000		
	2020	Rp.264.134.227,07		
	2021	Rp.49.888.959.000		

Pajak Dearah	2017	Rp.11.141.191.998.00
	2018	Rp.12.307.067.313.27
	2019	Rp.17.141.956.797.18
	2020	Rp.12.490.746.249.00
	2021	Rp.12.312.478.128.80
Retribusi Daerah	2017	Rp.1.782.479.458.00
	2018	Rp.1.615.985.576.00
	2019	Rp.2.544.533.211.00
	2020	Rp.2.868.218.118.00
	2021	Rp.2.647.973.407.00
Pendapatan Asli Daerah	2017	Rp.85.878.937.144.71
	2018	Rp.44.007.083.306.37
	2019	Rp.54.434.713.623.57
	2020	Rp.47.552.521.548.57
	2021	Rp.44.168.186.981.76

1.2 Analisis dan Pembahasan

1.2.1 Analisis Deskrptif

Penelitian ini menggunakan jenis data skunder yang merupakan data time series selama 5 tahun mulai dari tahun 2017-2021. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur, dan Dikrektorat. Pada penelitian ini variabel dependent yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya dalam penelitian ini terdapat 5 variabel independen yang digunakan yaitu Jumlah

Penduduk, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil penelitian yang didapatkan berasal dari hasil analisis Statistik Inferensial dengan cara menguji beberapa uji dan diolah menggunakan SPSS 21.

1. Deskripsi Jumlah Penduduk

Data jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitan ini adalah jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur dari tahun 20107-2021 dalam satuan jiwa. Kabupaten Manggarai Timur yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Dari tahun ke tahun penduduk Kabupaten Manggarai Timur selalu mengalami kenaikan, berikut data jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur tahun 2017-2021.

280000 276,308 275000 271,290 269,686 270000 267,310 265000 262,606 260000 255000 2017 2018 2019 2020 2021

Grafik 5.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Timur tahun 2017-2021

Gambar graik jumlah penduduk Tahun 2017-2021 dalam jiwa

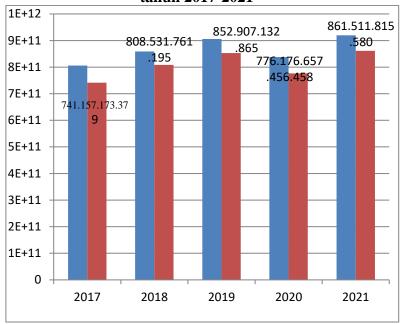
Terlihat pada gambar grafik jumlah penduduk, tahun 2017 jumlah penduduk sebesar 262,060 jiwa 2 tahun kemudian tahun 2019 jumlah penduduk sebesar 269,686 jiwa, berlanjut pada tahun 2021 total jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur berjumlah 276,308 jiwa.

Dengan demikian bisa disimpulkan setiap tahunnya pada Kabupaten Manggarai Timur untuk jumlah penduduk selalu bertambah setiap tahunnya. Jumlah penduduk dapat membantu meningkatkan PAD ataupun bisa dapat mengurangi PAD. Hal ini dikarenakan Kabupaten Manggarai Timur belom mampu mengelola SDA dan SDM yang dimiliki oleh daerahnya dengan baik, dan dapat merugikan pemerintah daerah.

2. Pengeluaran Pemerintah

Data pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2017-2021 dalam rupiah. Data tersebut digunkan untuk melihat seberapa pengaruh anggaran pemerintah dalam memengaruhi PAD pada Kabupaten Manggarai Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut data pengeluaran pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2017-202.

Grafik 5.2 Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Manggaraii Timur tahun 2017-2021



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur

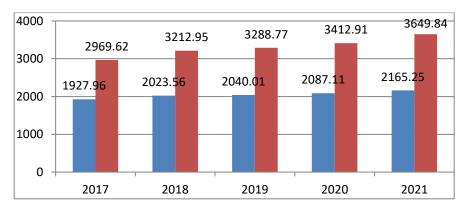
Dari gambar grafik diatas pengeluaran pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terlihat pada tahun 2017 sangatlah rendah dibandingkan dengan tahun 20019-202021, yang dimana bertepatan dengan terjadinya covid-19 sehingga pemerintah daerah mengeluarkan pengeluaran yang banyak guna untuk mencegah covid-19 pada 3 tahun tersebut. Untuk 2 tahun sebelumnya tahun 2017-2018 pengeluaran pemerintahnya tidak terlalu besar.

3. Deskripsi Produk Domestik Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang penting guna untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu wilayah dalam waktu periode tertentu, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. PDRB bisa diukur dengan tiga produksi, pendekatan, yaitu pendekatan pendekatan produksi, pendapatan pendekatan pendekatan serta pengelauran. **PDRB** menggambarkan kemampuan suatu wilayah guna menghasilkan nilai tambah pada output, oleh karena itu PDRB menjadi salah indikator yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB atas dasar harga konstan tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga sebuah perubahan yang sudah diperoleh, merupakan perubahan yang rill dan tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan harga.

Grafik 5.3
PDRB Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Statistik Kabupaten Manggarai Timur

Berdasarkan tabel diatas perlu diketahui bahwa PDRB di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2017-2021 jumlah PDRB yang paling tinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dengan jumlah PDRB pada tahun 2020 yaitu berdasarkan harga menurut lapangan usaha Rp. 3.2887.650.20 dan pada tahun 2021 berdasarkan harga berlaku menurut pengeluaran Rp. 3.412.906.17. Hal ini berrati Kabupaten Manggarai Timur mendapatkan peningkatan dalam PDRB setiap tahunnya untuk PDRB berdasarkan harga berlaku. Semakin tinngi nilai PDRB maka akan semakin tinggi jumlah pendapatan asli daerah pada suatau daerah, sebaliknya jika nilai PDRB semakin turun, maka pendapatan asli daerah yang dimiliki juga akan rendah.

4. Pajak Daerah

Dalam rangka untuk meningkatkan Penerimaan Daerah dalam hal sektor pajak merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk digali serta diperluas dalam hal pengelolaanya. Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah, yang dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu jika kontribusi PAD semakin besar terhadap APBD, maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Karena sumber keuangan yang bersal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber lain selain dari PAD. Dalam pajak daerah ditambah dengan retribusi daerah yang

dihasilkan dari pungutan yang wajib dibayarkan kepada pemerintah setempat sesui dengan undang-undang yang berlaku. Pengukuran variabel pajak daerah dalam miliaran rupiah.

Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Timur 2017-2021 3E+10 2.5E+10 2E+10 17**14**1956797 12307067313 11141191998 1.5E+10 12490746249 12312478128 1E+10 5E+09 0 2017 2018 2019 2020 2021

Grafik 5.4

Sumber: Badan Keuangan Manggarai Timur

Berdasarakan grafik 4.4 diatas menunjukan jumlah pajak di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2017-2021. Jumlah penerimaan pajak terbesar yakni pada tahun 2019 dengan realisasi yang didapatkan sebesar Rp.17.141.956.797,18 dan untuk perolehan pajak yang terendah terjadi pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp.12.312.478. 128, dengan target yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 27.475.843.962,00.

5. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen atau variabel yang sangat penting dalam meningkatan Pendapatan Aslli Daerah. Retribusi merupakan salah satu penerimaan yang wajib bagi pemerintah, yang dimana retribusi merupakan pungutan daerah sebagai salah satu pembayaran atas jasa ataupun pemberi izin tertentu yang khusus desediakan untuk diberikan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau badan.

4,000,000,000.00 2,868,218,118 3,500,000,000.00 2,544,533,221. 3,000,000,000.00 <mark>2,6<mark>47,</mark>973,4</mark>07 00 2,500,000,000.00 1,782,479,458. 00 2,000,000,000.00 1,615,985,576. 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00 500,000,000.00 2017 2018 2019 2020 2021

Grafik 5.5 Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017-2021

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur

Dari grafik di atas dapat menunjukan bahwa Retribusi Daerah di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2017-2021 memiliki hasil yang naik dan turun setiap tahunya. Jumlah penerimaan Retribusi Daerah yang paling besar terjadi pada tahun 2020 dengan realisasi yang didapat sebesar Rp. 2.868.218.118,00, kemudian pada tahun 2021 dengan tatrget yang besar tetapi realisasi yang didapatkan hanya sebesar Rp. 2.647.973.407. Dan untuk tahun sebelumnya memiliki hasil yang menurun terlebih pada tahun 2018 dengan realisasi yang didapatkan sebesar Rp. 1.615.985.576,00.

1.2.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah yang memiliki data terdistribusi normal. Uji normalitas merupakan salah satu uji yang dilakukan untuk megetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan analisis sample dengan membandingkan Probalitas Sample Kolmogorov-Smirnov Tes.

Tabel 5.2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal	Mean	.0000048
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	11609733717.89220000
Most	Absolute	.240
Extreme Differences	Positive	.240
Dinioronicos	Negative	123
Kolmogorov-Smirnov Z		1.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

a. Test distribution is Normal.

Sumber data: Hasil Pengelolaan Data dengan SPSS

Berdasarkan hasil Uji Normalitas di atas menunjukan bahwa nilai Sample Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200, dan dikatakan tingkat signifikanya > 0,05. Nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 5\%$ (0.200 > 0,05) yang artinya data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji ini dilakukan dengan cara menguji adanya keterkaitan atau korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Uji Multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai korelasi antar variabel indenpenden, apabila nilai korelasi < 0,8 maka dapat dikatakan tidak terdapat Multikolonieritas dalam model regresi ini.

Tabel 5.3 Multikolonieritas Coefficients^a

		Collinearity Statistics		
Model		Tolerance	VIF	
1	X1_JP	.495	2.019	
	X2_PP	.126	7.930	
	X3_PDRB	.464	2.153	
	X4_PD	.153	6.552	
	X5_RD	.106	9.435	

a. Dependent Variable: Y_PAD

Sumber hasil: Hasil Pengelolaan Data dengan Metode SPSS

Berdasarkan hasil uji Multikolinearitas untuk nilai tolerance untuk setiap varaibel independent (Jumlah Penduduk X1, Pengeluaran Pemerintah X2,PDRB X3,Pajak Daerah X5 dan Retribusi Daerah X5) dengan nilai lebiih besar dari 0,08, dan untuk nilai VIF pada masingmasing variabel independent (Jumlah Penduduk X1, Pengeluaran Pemerintah X2,PDRB X3,Pajak Daerah X5 dan Retribusi Daerah X5) lebih kecil dari <10%. Ini berarti model yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari masalah Multikolonieritas.

c.Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedasitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji ini dapat dilakukan menggunakan uji park, apabila uji nilai probability masing-masing varaibel $> \alpha = 5\%$, maka tidak akan terjadi Heteroskedasitas.

Tabel 5.4 Heteroskedasitas

Coefficients^a

		Unstandardize	Standardized Coefficients			
Ν	/lodel	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1328617199.688	3452462573.926		.385	.706
	X1_JP	4.64	4.40	.493	1.761	.100
	X2_PP	.015	.017	.511	.922	.372
	X3_PDRB	8.564	34.935	.071	.245	.810
	X4_PD	.342	.886	.195	.386	.705
	X5_RD	5.354	5.847	.554	.916	.375

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber Hasil: Hasil Pengelolaan Data dengan Metode SPSS

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedasitas menggunkan uji SPSS,output menunjukan tidak adanya hubungan yang signifikan anatara seluruh variabel independent terhada nilai absolut residual yaitu ditunjukan dengan Sig. lebih besar dari 0,05. Artinya model dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedasitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel. Uji autokorelasi menjelaskan apakah terhadap hubungan yang membentuk suatu pola tertentu antara data penelitian tahun sekarang dengan

tahun sebelumnya (t-1). Salah satu cara untuk mendeteksi masalah autokorelasi dapat digunankan uji Durbin Waston (DW).

Tabel 5.5 Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.834ª	.695	.586	13524930480.4310	1.093

Sumber Hasil: Hasil Pengelolaan Data dengan Metode SPSS

Keternagan

 $K = jumlah \ variabel$

N = 20 (jumlah triwulan)

d = 1.093

dU = 1.9908

4-dU = 4-1.9908

= 2,0092

dL = 1.093

Berdasarkan tabel dL= 1.093 dan dU= 1.990, kemudian berdasarkan tabel pembanding nilai dU < d < 4- dU, yang dimana 1.990 < 1.093< 2.009 . Dalam peneltian ini tidak terdapat autokorelasi.

1.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5.6 Regresi Linear Berganda Coefficients^a

			9001110101110			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Mo	odel	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	925326897.652	6678548714.809		.139	.892
	X1_JP	4.52	4.68	.144	.688	.503
	X2_PP	.041	.032	.533	1.282	.022
	X3_PDRB	19.148	67.580	061	.283	.008
	X4_PD	1.327	1.714	.293	.775	.045
	X5_RD	28.353	11.310	3.383	3.383	.004

Tabel coefficients digunakan untuk membuat persamaan regresi linear berganda.

Persmaan Regresi Linear Berganda

Yi=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4x4+b5x5+μi

Y=925326897.652+4.25X1+0.041X2+19.148X3+1.327X4+28.353X5

Bisa dikatakan pendapatan 925326897.652

- ➤ Konstanta B sebesar 925326897.652, angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti jika variabel independent Jumlah Penduduk X1, Pengeluaran Pemerintah X2, PDRB X3, Pajak Daerah X4 dan Retriusi Derah X5 nilainya 0, maka varaibel pendapatan Y bernilai 5648883166.829
- Nilai koefisien regresi variabel independent Jumlah Penduduk X1, Pengeluaran Pemerintah X2, PDRB X3, Pajak Daerah X4 Retribusi daerah X5 bernilai positif yaitu 4.52, 0.041,19.148, 1.327

dab 28.353. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan nilai sebesar 1 satuan pada variabel X1, X3 dan X5, maka nilai pendapatan akan meningkat berapa satuan % dengan asumsi variabel independent lainya bernilai tetap.

1.2.4 Uji hipotesis

1. Uji t-Statistik

Tabel 5.7 t-Statistik

Coefficients^a

		Unstandardiz	Standardized Coefficients			
Mo	odel	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	925326897.652	6678548714.809		.139	.892
	X1_JP	4.52	4.68	.144	.688	.503
	X2_PP	.041	.032	.533	1.282	.022
	X3_PDRB	19.148	67.580	061	.283	.008
	X4_PD	1.327	1.714	.293	.775	.045
	X5_RD	28.353	11.310	3.383	3.383	.004

Sumber Hasil: Pengelolaan Data dengan Metode SPSS

Keterangan : Signfikan pada < 0,05

Nilali t hitung > nilai t tabel

t tabel = t (a/2; n-k-1)

a=5% = t (0,05/2;20-5-1)

=0,025; 14

= 2.145

a. Jumlah Penduduk

Koefiseien variabel dari jumlah penduduk terhadap PAD adalah sebesar 4.52 dan nilai t hitung sebesar 0,688, sedangkan probabilitas atau Sig.

sebesar 0,503 > 0,05. Secara statistik menunjukan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Kabupaten Manggarai Timur. Besar kecilnya jumlah penduduk dalam suatau daerah tidak menjaminya bertambah penerimaan PAD daerah tersebut, sehingga H1 di tolak dan H0 di terima.

a. Pengeluaran Pemerintah

Sesuai dengan tabel 5.5 hasil uji t (parsial) menunjukan nilali signifikan pengeluaran pemerintah (X1) terhadap pendapatan asli daerah(Y) dengan nilai 0.022 < 0,05 dan nilai t hitung 1.282 < nilai t tabel 2.145. Yang artinya variabel pengeluaran pemrintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya H0 di tolak dan H2 diterima.

b. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Koefisien dari variabel PDRB yaitu sebesar 19.148 dan t hitung sebesar 0,283 dengan nilai Sig. sebesar 0,008 < 0,05. Artinya secara statistik menunjukan bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Itu artinya H0 di tolak H3 diterima.

c. Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkank tabel 5.5 dan hasil uji t (persial) menunjukan bahwa nilai Sig. Pajak Daerah (X4) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 0,045 < 0,05 dan nilai t hitung 0,775 < nilai t tabel 2.145. Artinya variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.artinya Ho di tolak dan H4 diterima.

d. Retribusi daerah

Berdasarkan tabel 5.5 dan uji hasil t (persial) menunjukan bahwa nilai Sig. Retribusi Daerah (X5) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 0,004 < 0,05) dan nilai itung t 3.383 > nilai t tabel 2.145. Artinya variabel Retribusi daerah untuk H0 ditolak dan H5 diterima, terdapat pengaruh signifikan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

f. jumlah penduduk,penegeluaran pemerintah, PDRB, Pajak daerah dan Retribusi daerah.

Berdasarkan tabel 5.5 dan uji hasil t menunjukan bahwa dari ke 5 variabel ada satu variabel yang tidak berpenagruh signifikan yaitu Jumlah penduduk dengan nilai signifikan sebesar 0,503 > 0,05, sedangkan ke-4 variabel yang lainnya berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai Sig. dibawah 0,05. Artinya ke-5 variabel hanya satu yang tidak berpengruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Manggarai Timur.

2. Uji F – statistik

Tabel 5.8
F – statistik
ANOVA^a

N	lodel	Sum of Squares	df Mean Square		F	Sig.
1	Regression	21.7664803	5	21.06751032	6.386	.003
	Residual	21.40839812	14			
	Total	21.9243744	19			

Sumber Hasil: Pengelolaan Data dengan Metode SPSS

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5.7 diperolah nilai f sebesar 6.386 dan signifikanya sebesar 0,003 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah.

1.1.3 Uji Koefisien Determinasi (*R2*)

Tabel 5.9 Koefisien Determinasi (*R2*) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.834ª	.695	.586	13524930480.4310

Sumber Hasil: Hasil Pengelolaan Data dengan Metode SPSS

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variaelvariabel dependennya. Berdasarkan uji hasil pengelolaan data yang ditampilkan di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjust R- Squere sebesar 0.586, artinya bahwa 60% dari variabel pendapatan asli daerah di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2017-2021 dapat dijelaskan oleh variabel Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, sedangkan yang 40% dijelaskan variabel lain diluar penelitian ini

Dari hasil uji yang dilakukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan pada PAD di Kabupaten Manggarai Timur, yang artinya jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD ketika jumlah penduduk tinggi atau rendah. Jika dilihat dari data jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Timur dari Tahun 2017-2021 setiap tahunnya mengalami kenaikan yang tidak terlalu jauh dari tiap tahunnya, sementara realisasi PAD yang dihasilkan dari 2017-2021 mengalami realisasi yang cukup jauh dari target yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini disebabkan begitu banyak masyarakat yang tidak bekerja meskipun SDA yang memadai, sehingga membuat masayarakat terlambat atau susah untuk membayar pajak dan retribusi daerah, dapat disimpulkan bahwa bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk tidak akan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Valentinus Medardus Turung "bahwasannya karena Kabupaten Manggarai Timur merupakan Kabupaten yang baru dimana masyarakat dan pemerintah belom bisa melihat potensi-potensi yang di miliki oleh kabupaten yang nantinya mendatangkan PAD bagi Kabupatennya. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang besar tidak menjamin bagi suatu daerah untuk dapat menggali potensi PAD yang ada.

Hubungan antara jumlah penduduk dengan PAD, adalah besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka akan pendapatan juga akan ikut meningkat. Akan tetapi pertumbuhan penduduk tidak mempengaruhi pendapatan secara proposional. Artinya dalam setiap hubungan antara keduanya tergantung pada sifat serta masalah kependudukan yang dihadapi, secara setiap daerah pasti memiliki masalah kependudukan dan potensi yang berbeda-beda. Dampaknya bagi pemerintah daerah yaitu bertambahnya jumlah penduduk secara rasional dapat menurunkan pendapatan perkapita. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya jumlah penduduk akan menyebabkan bakanyak masyakarat yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, jadi akan sulit bagi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah sehingga dapat memperburuk PAD untuk daerah tersebut.

Menurut Widarjono dalam Budiharjo mengatakan bahwa, jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh perencanaan dan pembangunan dipandang sebagai asset modal besar bagi pembangunan tetapi juga sekaligus juga dipandang sebai beban. Pembangunan sebagai asset apabila dapat meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran,

dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggung penduduk yang bekerja secara efektif.". Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan antar daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. jumlah penduduk yang besar tidak menjamin bagi suatu daerah untuk dapat menggali potensi PAD yang ada. Hal ini masi bisa ditentukan oleh banyak faktor seperti, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga jumlah penduduk yang kecil saja mungkin berkualitas danakan lebih berpotensial dalam hal meningkatkan PAD pada suaau daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh "Adi Haryanto (2014) dalam penelitian yang berjudul "Studi tentang Pertumbuhan Ekonomi , Belanja Langsung Pemerintah Daerah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan asli Daerah pada satu wilayah penggabungan Wilayah Gerbangkertosusilo", yang mengatakan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini disebabkan karena ada beberapa indikator yang menyebabkan jumlah penduduk tidak berpengaruh dengan pendapatan asli daerah adalah komposisi jumlah penduduk usia tidak produktif hampir sama dengan penduduk pada usia produktif yang bekerja. Usia

produktif dalam konteks ini yaitu penduduk dengan usia kerja di bawah 15 tahun dan penduduk dengan kategori bukan angkatan kerja yang terdiri dari ibu rumah tangga, orang cacat, anak sekolah maha siswa serta pengangguran.

Penelitian ini tidak sejalan juga dengan peneltian yang dilakukan oleh Rani (2021) yang menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh sifnifikan terhadap variabel PAD. Hal ini didasari karena meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah di 35 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Manggarai Timur dengan nilai Signifikansi (0,035) yang lebih kecil dari nilai signifikasi yang diharapkan (0,05). Artinya Kabupaten Manggarai Timur bisa menggunkan pengeluaran pemerintah sesuai yang dibutuhkan, pengeluaran daerah yang dikeluarkan oleh Kabupaten Manggarai Timur dengan Target yang besar dan realisasi yang kecil, dapat membantu PAD Kabupaten Mnaggarai Timur tetap baik dan mendapat PAD yang cukup tinggi dengan realiasi PAD yang tidak terlalu rendah dibandingkan dengan target yang sudah di tetapkan. Ini dikarenakan penegeluaran pemerintah merupakan salah satu kewjaiban daerah yang diakui

sebagai penguranagan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Valentinus Medarus Turung,SE "Pengeluaran pemerintah Kabupaten Manggarai Timur juga digunakan sebagai penyediaan barang public dengan cara melakukan pembangunan, hal ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah tersebut, sehingga dengan meningkatkan kegiatan ekonomi membuat pemerintah akan mengenakan pajak dan retribusi daerah sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah".

Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan PAD adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah guna untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran pemerintah setiap penerimaan serta tahunnya. Pengeluaran pemerintah merupakan kebijkan pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus menyediakan barang publik, karena tidak ada sektor swasta yang dapat menyediakan barang yang dapat dinikmati oleh orang banyak. Dalam hal ini pemerintah dapat menggunakan pajak dan retribusi daerah sehingga PAD juga akan ikut meningkat. Dampaknya semakin besar besar pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah maka akan mendorong meningkatnya kegiatan ekonomi masyrakat. Apabila kegiatan ekonomu masyarakat meningkat maka dipastikan meningkatnya aliran PAD. Hal ini dapat diasumsikan bahwa kebijkan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan public dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur dalam hal sektor fasilitas umum seperti bidang kesehatan, tempat wisata, pasar/tempat perdagangan dan juga membangun BUMD yang dimana dapat mengoptimalkan dalam pemanfaatan SDA yang ada di daerah sehingga dapat meningkatkan jumlah retribusi yang merupakan salah satu komponen dalam sumber PAD.

Menurut teori yang dijelaskan oleh Wagner mengenai pengelauaran perintah yang semakin besar dalam pendapatan perkapita meningkat, secara raltif dapat meningkatkan penegeluaran. Didukung dengan teori Peacock dan Wiseman bahwa pemerintah juga memiliki peran sebagai katalisator dan fasilator sehingga membutuhkan anggaran belanja untuk melaksanakan pembangunan. Penegluaran digunakan sebagai administrasi pembangunan dan sebagaian lagi untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Sehingga pembelanjaan tersebut dapat meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertingi kegiatan ekonomi, dan dapat meningkatkan PAD.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmaza (2011), yang menyatakan pengeluaran pemerintah berpengaruh

signifikan terhadap PAD. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah merupakan kemampuan keuangan antar daerah, artinya dapat mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Selain itu pengeluaran pemerintah juga merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan di Kota Semarang. Selain itu tidak sejalan dengan peneltian yang dilakukan oleh Fauzi (2016) yang mengatakan bahwa penegeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikakn terhadap PAD. Hal ini disebabkan karena perbedaan yang cukup besar antar kabupaten dan kota di Kabupaten/Kota se Provinsi DIY, sehingga pengeluaran pemerintah tidak dapat menentukan besar kecilnya PAD yang dicapai

3. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Manggarai Timur. Artinya semakin besar produk domestic regional bruto yang diterima oleh Kabuapten Manggarai Timur, maka semakin besar pula realisasi Pendapatan Asli Daearah yang diterima Kabupaten Manggarai Timur. Ini sesuai dengan data yang diberikan dimana PDRB untuk Kabupaten Manggarai Timur Setiap tahunnya meningkat, yang di tentukan berdasarkan harga konstan yang setiap tahunnya meningkat. Selama tahun penelitin, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, yang didapatkan oleh

Kabupaten Manggarai Timur cukup tinggi untuk membantu PAD di Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Valentinus Medardus Turung "bahwasannya PDRB Kabupaten Manggarai Timur yang di ukur dari harga konstan dan harga jual barang dan jasa sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Manggrai Timur. Peningkatan perkipita yang tinggi dapat membantu membayar pajak dan retribusi daerah sehingga PAD meningkat di Kabupaten Manggarai Timur".

Hubungan antara PDRB dan PAD adalah hubungan yang fungsional, karena pada dasarnya PDRB merupakan salah satu fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk dapat membiayai program pembangunan pemerintah daerah. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitanasnya. Dampaknya jika semkin tinggi PDRB maka secara tidak langsung pajak daerah mengalami peningakatan, sehingga PAD juga akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu dalam penelitian ini disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhap PAD.

Hal ini sesui dengan teori yang dinyatakan oleh Halim yaitu salah satu indikator yang dapat diguanakan untuk dapat mengetahui kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah atau upaya Pendapatan Asli Daerah adalah rasio antar total penerimaan PAD dengan PDRB. Pendapatan perkapita menunjukan kemampuan masyarakat dalam hal membayar pengeluarannya termasuk mengkomsumsi barang dan jasa. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita yang dimilki masyarakat maka akan mempunyai pengaruh yang positif dalam hal meningkatkan penerimaan pajak. Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang cukup penting untuk mengetahui kondisi ekonomi pada suatu wilayah dalam suatau periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawira (2016) yang meneliti tentang pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil peneltian ini menunjukan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh pendapatan perkapita yang di miliki oleh Kabupaten/Kota se Provinsi DIY mengalami kenikan yang tinggi. Hal ini mengakibatkan semakin besar pula kemampuan masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi DIY untuk membiyai pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah daerah. Maka bisa dikatakan semakin tinggi pendapatan perkapita maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah. Hal ini

tidak sejalan dengan penelitian Wahyuni (2017) yang mengatakan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Bandar Lampung. Hal imi disebababkan oleh kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan PAD di Kota Bandar Lampung lebih banyak mengalami penurunan tetapi PDRB nya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan pendapatan perkapita di Kota Bandar Lampung lima tahun terakhir selalu meningkat terlebih khusus pada tahun 2011 sebesar 26,72 dan pada tahun 2015 menjadi 31,69. Kemungkinan kondisi seperti inilah yang membbuat PDRB yang seharusnya berpengarush signifikan terhadap PAD, menjadi tidak berpengaruh signifikan karena masih belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang ada di Kota Bandar Lampung.

4. Pajak Daerah

Pajak daerah berpengaruh signifikan terhap PAD di Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata daerah di Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2017-2021, memperoleh penerimaan pajak yang tidak terlalu jauh dari target yang sudah ditentukan. Daerah memberikan sumbangan dari pajak daerah untuk meningkatkan PAD. Daerah mendapatkan kewenangan dalam menggali potensi daerahnya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Semua itu dikarenakan Kabupaten

Manggarai Timur memiliki kapasitas penduduk yang banyak dan masyarakat yang berdomisili mempunyai pekerjaan dan masyarakat bisa mengelola ekonomi mereka dengan baik, sehingga bisa membuat pajak daerah bertambah, dan PAD juga ikut meningkat. Hal ini sesuai dengan disampaikan oleh Bapak Valentinus yang Turung "bhawasannya pajak daerah merupakan salah satu penerimaan yang penting bagi pemerintah dalam meningkat PAD Kabupaten Manggarai Timur. Pajak daerah yang dibayarkan oleh masyarakat menjadi sumber penyumbang besar bagi PAD, sedangkan pemerintah yang mengelola sumber kekayaan pajak harus memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat". Hal ini didasari jika penerimaan pajak meningkat maka PAD juga akan meningkat, jika PAD meningkat otomatis pemerintah dapat membantu masyarakat dengan cara menyediakan infrastruktur yang memadai untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.

Hubungan pajak daerah dengan Pendapatan Asli Daerah tidak terlepas dari semua pihak yang memlliki kepentingan. Salah satu asas pemungutan pajak yang paling berperan saat ini adalah asas *certainty* yaitu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2009. Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan yang sangat penting

untuk meningkat PAD pada suatu daerah, jumlah pennrimaan pajak daerah adalah jumlah yang cukup besar karena dihitung dari begitu banyak wajib pajak yang akan dibayar setiap tahunnya. Dampaknya yaitu pemerintah daerah dapat membiyai pengeluran pemerintah mereka dalam hal untuk pembangunan daerah dari hasil pajak daerah. Pajak daerah merupakan penerimaan yang penting bagi pemerintahan daerah, meningatnya pajak daerah sangat dapat membantu daerah dalam hal pembangunan daerah pembiyaan pemerintah untuk daerah. Oleh kareba itu ketika pajak daerah menigkat maka akan berpengaru terhadap PAD yang dimana PAD juga akan ikut meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian Fina (2018) yang menyebutkan bahwa variabel pajak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Eks-Karesindenan Pekalongan tahun 2010-2016. Ini dikarenakan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten/Kota Eks-Karasidenan Pekalongan. Kemampuan daerah dalam menggali PAD dapat memengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah. Disamping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APDB, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat oleh Kabupaten/Kota Eks-Karasindenan Pekalongan. Kemudian penelitian yang dilkukan oleh Nugroho (2014) yang menyebutkan variabel pajak daerah berpengruh positif signifikan terhadap PAD di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini

disebabkan oleh pajak daerah yang dimiliki Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan di lihat dari 35 Kabupaten/Kota untuk pajak daerah terhitung dari tahun 2010 ke 2011 dan dikuuti juga dengan kanaikan PAD sebanyak 30 Kabupaten/Kota. Sedangkan dari tahun 2011 ke tahun 2012 pajak daerah yang dimiliki menurun menjadi 33 Kabupaten/Kota dan PAD meningkat menjadi 32 Kabupaten/Kota.

5. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikasinya sebesar 0,004 artinya nilia tersebut < 0,05. Hal ini berarti bahwa penerimaan realisasi yang di dapatkan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017-2021 tidak terlaluh jauh dari target yang sudah ditetapkan. Penerimaan retribusi daerah terkait dengan tingkat aktivitas sosial ekonomi, masyarakat yang menggunakan produk dan jasa yang disediakan pemrintah, dan bisa memanfaatkan produk dan jasa yang diberikan dengan baik, sehingga dapat meningkat ekonomi masyarakat yang baik dan bisa membayar retribusi daerah dengan baik sehingga dapat meningkat PAD pada Kabupaten Manggrai Timur. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Valentinus Tunur "bahwasannya Retribusi Daerah salah satu penerimaan yang penting bagi pemerintah dalam menunjang PAD, serta pengeluaran pemerintah. Penerimaan retribusi

daerah adalah salah satu penrimaan yang sangat membantu pemerintah untuk menambah pengeluaran pemerintah guna untuk pembangunan ekonomi daerah dalam pembangunan infrastruktur". Retribusi Daerah salah satu pungutan daerah yang sangat dibutuhkan, karena untuk sekarang di Kabupaten Manggarai Timur begitu banyak jasa usaha, dan jasa umum yang digunakan oleh masyarakat, dari situlah penerimaan Retribusi didapatkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu.

Hubungan retrribusi daerah dengan PAD yaitu retribusi daerah juga merupakan salah satu bentuk atau peran masyarakat dalam meyelenggarakan otonomi daerah, semakin besar jumlah penerimaan retribusi disuatu daerah, maka semakin besar jumlah pula jumlah penerimaan Pendapatan Daerah tersebut. Dengan begitu hubungan antara Pajak dan Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yaitu jika jumlah penerimaan Retribusi daerah naik, maka pendapatan asli daerah juga akan mengalami kenaikan. Dampaknya bagi pemerintahan adalah pemerintah sangat terbantu dalam hal pembiayaan untuk pembangunan daerah. Sama halnya dalam pajak daerah, retribusi juga merupakan salah satu penerimaan yang penting dalam pemerintahan daerah karena keduanya merupakan sumber penerimaan untuk PAD. Retribusi daerah meningkat maka akan sangat membantu pemerintah dalam hal pengeluaran pemerintah guna untuk

pembiayan pembangunan daerah. Maka ketika retribusi daerah meningkat maka PAD juga akan ikut meningkat dan pengeluaran pemerintah juga akan berjalan dengan sebaiknya.

Retribusi Daerah merupakan salah satu pembiyaan jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau lembaga, diatur dalam UU NO.28 Pasal 1 ayat 6 Tahun 2009, yang telah di ganti menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Semua bentuk pajak daerah dapat dipungut oleh daerah. Kontribusi masrakat terhadap retribusi daerah diantisipasi untuk dapat meningkatkan Pendapatan Retribusi Daerah. Pengumpulan pendapatan asli daerah meningkat berbading Illurus dengan penerimaan retribusi daerah. Oleh karena itu, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah memiliki huungan, di mana pendapatan asli daerah meningkat berartri peningkatan tersbut berasal dari jumlah penrimaan retribusi daerah yang dimiliki.

Hal ini sejalan dengan peneltian yang dilakukan oleh Rani (2021) yang menyebutkan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifkan terhadap Pendapatan Asli Daerah di 35 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2021. Hal ini disebabkan oleh retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah, yang dimana retribusi daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah mencukupi untuk bisa memengaruhi PAD. Retribusi Daerah yang

dimiliki terhitung dari tahun 2013-2021 sangat baik, dengan realiasai yang dihasilkan tida jauh berbeda dari target yang sudah ditetpakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.